

Transparency & Confidence Building Measure di Bidang Keantariksaan: Keniscayaan dalam Hubungan Internasional Kontemporer

Totok Sudjarmiko

*Pusat Pengkajian dan Informasi Kedirgantaraan Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional Jakarta*

ABSTRAK

Setiap negara khususnya negara pemilik teknologi antariksa atau lebih dikenal dengan space faring di dalam menyusun kebijakan luar negerinya akan menempatkan keantariksaan sebagai suatu variable utama. Hal ini disadari karena manfaat strategis dari antariksa yang memang sangat luas dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Kondisi politik dan keamanan dunia internasional terkait antariksa telah menggiring para pemikir strategis untuk melahirkan konsep confidence building measure (CBM), dan sejalan dengan perkembangan dunia keantariksaan yang menuntut kebijakan yang lebih transparan maka digulirkanlah kemudian konsep Transparency Confidence Building Measure (TCBMs). Tulisan ini berupaya memberikan gambaran terkait pemahaman bahwa TCBMs merupakan konsep yang diawali dengan membangun konstruksi berpikir dari semua masyarakat dunia.

Kata-Kata Kunci: *Teknologi antariksa, Politik, Pertahanan dan Keamanan, CBM, TCBM.*

Each country especially countries which has a space technology or as we known space faring countries when make it`s foreign policy will put space as a primary variable. It is recognized as the strategic benefit of space which is very broad and covers all aspects of human life. The political condition and international security which related to space has led strategic thinkers to give birth to concept of confidence building measure (CBM), and in line with the space development that demands of more transparency policy then rolled the concept Transparency Confidence Building Measure (TCBMs). This paper attempts to provide an overview related to the understanding that TCBMs is a concept that begins with building construction to think of all the people of the world.

Keywords: *Space technology, Politics, Defence and Security, CBM, TCBM.*

Dalam era dunia memasuki situasi dan kondisi yang dalam pandangan para pemikir Hubungan Internasional di golongan kedalam situasi

interdependensi dan kondisi *the shrinking world* atau mengalami penyusutan dalam arti menyempit dengan semakin dekatnya jarak antar wilayah bahkan batas-batas negara pun menjadi samar, maka situasi dan kondisi tersebut menjadi saling melengkapi di dalam membentuk wajah dunia saat ini. Faktor penting yang menyebabkan hal itu dimungkinkan terjadi adalah adanya keterbukaan atau transparansi, bahkan dalam hal melakukan semua negosiasi antar pihak yang berinteraksi di arena internasional akan selalu menitik beratkan kepada hal-hal yang menuntut adanya suatu sikap keterbukaan khususnya informasi yang menjadi titik sentral dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat dunia.

Transparansi ini sangat dibutuhkan dan menjadi tuntutan apabila berkenaan dengan masalah-masalah yang bersentuhan dengan keselamatan dan keamanan seluruh mahluk penghuni dunia. Untuk itu pendekatan-pendekatan strategis baik itu dilakukan dengan melalui pola-pola bilateral maupun multilateral menjadi suatu keniscayaan yang sulit terbantahkan, sehingga transparansi saat ini telah menjadi fokus dan “tools” dalam berdiplomasi dan hubungan internasional. Adapun yang menjadi faktor pendorong terjadinya interdependensi dan penyusutan dalam dunia internasional adalah kemajuan teknologi informasi yang didasarkan kepada kegiatan antariksa.

Keantariksaan merupakan variabel pokok saat ini didalam kebijakan-kebijakan luar negeri yang diproduksi oleh para pemimpin negara-negara di dunia. Hal ini dikarenakan antariksa sekarang telah mengalami pertumbuhan yang penting dan signifikan bagi kehidupan di bumi, seperti ditemui pada peran satelit dan *spacecraft* yang berfungsi sangat kritis bagi ekonomi global. Aspek ekonomi banyak yang ditentukan oleh perkembangan keantariksaan, seperti yang disampaikan oleh Theresa Hitchens (2013) dari *Federation of American Scientists* (FAS) yang meliputi kemampuan transfer bank, revolusi pergerakan barang dan jasa, penggunaan internet, dan prediksi cuaca dan bencana alam serta kemungkinan untuk respon cepat untuk mengatasi masalah tersebut. Selain untuk mendukung aspek ekonomi ditambahkan juga oleh Hitchens (2013) bahwa operasi antariksa juga mengalami perkembangan yang penting khususnya bagi kepentingan tujuan militer, dimana digunakan untuk operasi militer yang luas yang mencakup seluruh permukaan bumi. Sehingga akan timbul permasalahan besar yaitu keamanan antariksa akan berdampak pada keamanan nasional dan internasional, tentunya hal ini disebabkan oleh potensi peran satelit selama suatu konflik berlangsung.

Dalam bidang politik dan keamanan kondisi dunia internasional telah menggiring para pemikir strategis untuk melahirkan konsep *confidence building measure* (CBM) yang sangat mewarnai pemikiran-pemikiran

kebijakan politik luar negeri, perang dan damai. Kemudian sejalan dengan kemajuan teknologi antariksa yang semakin signifikan dalam menentukan nasib hidup manusia dan lingkungan yang mengelilinginya, maka tentu saja semakin menambah tingkat ancaman yang ditimbulkan dari efek kegiatan antariksa yang ada. Secara umum memang antariksa sulit untuk melepaskan diri dari ancaman dan tantangan yang serius dan negara-negara *space faring* menyadari hal itu sehingga dilakukanlah operasi-operasi untuk mengamankan dan menyelamatkan antariksa. Untuk itu konsep CBM ini kemudian mengalami penajaman dan penguatan kembali dalam bentuk *Transparency Confidence Building Measure* (TCBM). Pemahaman terhadap konsep-konsep seperti ini didasarkan kepada pendekatan untuk membangun konstruksi berpikir dari semua masyarakat dunia khususnya para pemimpin negara-negara yang dikenal dengan *space faring* (negara besar pemilik teknologi antariksa). Dari pemaparan latar belakang tersebut dapat ditarik sebuah permasalahan yang dengan menggunakan pendekatan deskripsi sebagai alat di dalam menggambarkan bagaimana di dalam hubungan internasional saat ini TCBM menjadi hal yang sulit untuk dihindari dalam kegiatan antariksa dunia.

Confidence Building Measures

Berbicara mengenai CBM maka *setting* internasional yang digunakan dapat dilihat dari berakhirnya Perang Dingin antar kekuatan *bipolar*, yaitu Uni-Soviet dan AS. Tetapi bukan berarti dengan berakhirnya Perang Dingin tersebut menjadi jaminan bahwa persoalan keamanan internasional menjadi tereduksi. Sebagaimana diketahui pola-pola kerjasama militer di masa Perang Dingin sangatlah tradisional yaitu diwarnai dengan kerjasama peralatan militer yang digunakan untuk menghadapi serangan pihak eksternal, dalam hal ini para rekan aliansi kedua blok yang bersitegang. Akan tetapi pola-pola kerjasama tradisional seperti itu tidak lagi menjadi sesuatu yang signifikan lagi.

Pada konteks ini dapat dikatakan bahwa kerjasama keamanan paska berakhirnya Perang Dingin menekankan pengurangan rasa curiga yang pada gilirannya secara esensi akan meningkatkan derajat kesepahaman bersama, sebagaimana disampaikan oleh Chari (2003), bahwa dengan mengurangi kecurigaan akan mendorong meningkatnya pemahaman bersama atau *by reducing suspicions, CBMs can essentially increase understanding*.

Sedangkan menyangkut wilayah kegiatan CBM, The Henry L. Stimson Center (t.t.) menyampaikan beberapa perangkat yang dapat digunakan untuk mengukur perilaku negara, yaitu 1) Perangkat Komunikasi, saluran komunikasi antar negara khususnya pada kelompok negara yang rawan

konflik akan sangat membantu didalam upaya meredakan ketegangan pada saat-saat kritis, disini peran dari CBM mampu menyediakan satu mekanisme konsultasi yang baik dan teratur; 2) Tindakan Pembatasan, pembatasan ini dirancang untuk menjaga jenis dan tingkat kekuatan militer negara tertentu, khususnya yang berada di sepanjang perbatasan. Langkah-langkah ini dapat mencakup pemberitahuan awal dari pergerakan pasukan diatas tingkat pra-disepakati atau pembatasan penempatan pada saat latihan militer. Membatasi zona penggelaran pasukan baik yang didalam zona maupun di luar zona, juga membatasi tipe dan jumlah peralatan militer atau pasukan yang diijinkan di dalam atau yang didekat kawasan tertentu atau perbatasan; 3) Tindakan Transparansi, tindakan yang bersifat transparansi ini meliputi langkah-langkah yang mampu mendorong keterbukaan yang lebih besar atas informasi kemampuan dan kegiatan militer. Upaya transparansi tersebut dapat mencakup persyaratan pra-notifikasi, pertukaran data, dan secara sukarela memberikan ijin untuk mengamati latihan militer dan prosedur operasi; 4) Tindakan Verifikasi, tindakan verifikasi ini dirancang dalam rangka untuk mengkonfirmasi atau memverifikasi dari aspek kepatuhan negara terhadap perjanjian tertentu. Aspek kepatuhan ini termasuk di dalamnya adalah inspeksi udara dan inspeksi lapangan yang didasarkan kepada sistem sensor elektronik.

Selanjutnya CBM ini menurut Umbreen Javaid (2010) akan bekerja melalui beberapa tingkatan pada aktor dan pranata internasional, dengan pola 1) kontak antara *people to people*, 2) *Non-Government Organisations*, 3) meningkatkan perdagangan dan kerjasama militer, dan 4) pertukaran budaya.

Konsep dari CBM ini memang adalah didasarkan pada seperangkat langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi salah persepsi, sehingga penekanannya selalu kepada langkah-langkah yang hendak dilakukan, sebagaimana juga yang disampaikan oleh Cheema (2001) bahwa CBMs dapat digambarkan sebagai ukuran atau langkah-langkah yang membantu membangun kepercayaan dan pendapatnya ini dituangkan dalam tulisannya "*What CBMs have gained until now*", dimana dijelaskan dalam kutipan "*CBMs can be described as measures or steps that help build confidence, seize the undesired drift towards open hostility and reduce tensions*".

Selain seperangkat alat untuk mengurai kesalahan persepsi, CBMs juga dapat dimaknai sebagai seperangkat mekanisme untuk mencegah perang, sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Desjardin (1996) yaitu *CBMs can be an effective mechanism for prevention of war, arms control and disarmament, agreements and facilitating conflict resolution*. Dalam kerangka baik untuk mengurangi kesalahan persepsi atau mencegah perang, maka tentu saja CBM ini kemudian pada

gilirannya harus dapat memfasilitasi dan mengarahkan kepada suatu atmosphere yang kondusif mengurangi ketegangan dan melahirkan komunikasi yang baik dari kedua pihak. Hal ini ditegaskan oleh Jaspal (2004) bahwa *“CBMs are supposed to be the modest steps that are required in facilitating and guiding in the correct environment to lessen tensions and allow communication of political and military leadership on both sides”*.

Menuju *Transparency Confidence Building Measures* (TCBMs)

TCBMs pada konteks mendorong tindakan yang lebih bertanggung jawab dari negara dalam kegiatan antariksanya merupakan suatu sarana yang dapat digunakan pemerintah dari negara-negara untuk mengatasi tantangan dan berbagi informasi dengan tujuan untuk mengurangi intensitas ketegangan dengan cara meningkatkan saling pengertian atau *mutual understanding*. Saling pengertian ini tentunya akan bermuara kepada masalah keselamatan dan keamanan manusia. Isu keselamatan dan keamanan manusia ini meskipun telah mulai ada semenjak operasi antariksa dilakukan oleh manusia dengan memasuki era keantariksaan pada tahun 1957, tetapi operasi antariksa sendiri kemudian berkembang pesat sehingga isu keselamatan dan keamanan manusia intensitas pembahasannya mengalami peningkatan khususnya di tingkat multilateral. Perkembangan pada tingkat multilateral tentu saja akan lebih efektif untuk membicarakan ancaman terkait keamanan antariksa.

TCBMs sendiri merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan mekanisme kenegaraan yang bersifat multilateral, bahkan hal ini juga telah menjadi bagian dari resolusi PBB yang sangat berguna khususnya didalam masalah peningkatan saling pengertian, mengurangi tingkat mispersepsi dan lebih khusus adalah meredakan eskalasi ketegangan. Selain itu tentu saja bermanfaat untuk memajukan iklim bagi pengendalian senjata dan non-proliferasinya. Dalam Resolusi Majelis Umum PBB khususnya sejak tahun 1990 juga mengakui arti pentingnya TCBMs bagi suatu era baru keantariksaan. Kemudian antara bulan Juli 1991 dan Juli 1993, sekelompok pakar yang telah ditunjuk oleh Sekjen PBB telah mengembangkan sebuah studi yaitu aplikasi dari TCBMs pada antariksa.

Terkait TCBMs ini, meskipun AS semenjak tahun 2005 sampai dengan 2008 tidak melakukan dukungannya terhadap pembahasan ini di Resolusi Majelis Umum untuk kegiatan antariksa PBB, akan tetapi pihak Rusia telah menjadi sponsor utama pada Resolusi Majelis Umum untuk kegiatan antariksa semenjak tahun 2005. Kemudian pada tahun 2009 pemerintahan Obama merubah pandangan terhadap permasalahan ini

dan selanjutnya pada tahun 2010 Presiden Obama menyampaikan didalam Kebijakan Antariksa Nasional AS bahwa AS sedang melakukan TCBMs yang dilakukan baik melalui cara-cara bilateral maupun multilateral dalam kerangkamendorong tindakan yang bertanggung jawab dalam penggunaan antariksa khususnya digunakan hanya untuk kepentingan damai.

Adapun substansi dari TCBMs itu sendiri secara sederhana adalah berisi tindakan yang pragmatis, dilakukan dengan sukarela dan dalam tempo waktu jangka pendek, dimana dipilih tindakan-tindakan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan dan mencegah kesalahpahaman, salah perhitungan yang pada gilirannya menimbulkan ketidakpercayaan pada tingkat hubungan antar bangsa dan antar negara.

Disadari bahwa kondisi tatanan internasional diliputi oleh nuansa ketidakpercayaan yang sangat rentan beresiko menimbulkan bahaya, oleh sebab itu dibutuhkan sebuah bangunan yang didasarkan kepada kepercayaan antar bangsa dan antar negara. Selanjutnya kepercayaan tersebut dari segi perilaku manusia dapat dicapai dengan tindakan transparansi, keterbukaan dan prediktabilitas seperti melalui pertukaran berbagai informasi. Selain itu dengan penerapan konsep saling percaya khususnya di bidang antariksa dalam wujud TCBMs akan berpotensi meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi kita tentang lingkungan antariksa. Pemahaman terhadap perlindungan wilayah antariksa ini dapat kita capai dengan melihat pentingnya wilayah atau kawasan-kawasan yang menjadi tumpukan sampah di orbit, kepekaan terhadap kondisi situasional dari antariksa, dan menghindari terjadinya tabrakan serta mengambil tindakan yang dapat digunakan untuk membantu meningkatkan kedekatan dan kepercayaan dan keberanian mendorong keterbukaan diantara aktor-aktor antariksa. Konsep saling percaya yang dibangun dalam pemahaman TCBMs ini juga dapat dilakukan baik konteks global maupun konteks regional, secara bilateral, multilateral atau unilateral.

Lingkungan Antariksa Sebagai Aset Bersama

Antariksa sebagai sebuah kawasan sebagaimana keberadaan ruang udara, darat dan laut juga harus masuk dalam pemikiran dan pertimbangan manusia untuk melakukan upaya-upaya perlindungan terhadap keberadaan dan kelestariannya, baik saat ini maupun di masa depan. Mengingat hal tersebut, maka perlindungan terhadap kawasan antariksa termasuk didalamnya bulan dan benda langit lainnya menjadi sebuah keharusan untuk diangkat sebagai subyek dari wacana pemikiran masyarakat internasional yang cukup krusial. Untuk itu pendefinisian

terhadap antariksa walaupun sebagai sebuah wilayah yang berada diluar yurisdiksi setiap atau sekelompok negara akan tetapi telah menjadi sebuah kepentingan bersama bagi seluruh umat manusia "*global commons*" merupakan langkah awal dari masyarakat internasional untuk melakukan upaya-upaya perlindungan dari akibat atau dampak kegiatan antariksa oleh manusia. Hal ini karena masalah *global commons* memiliki sisi kerentanan yaitu kecenderungan terhadap kegiatan antariksa yang berlebihan sebagai dasar dari sebuah target eksploitasi antariksa.

Mempertimbangkan dari dampak kegiatan eksploitasi antariksa oleh negara-negara yang cenderung menimbulkan ancaman terhadap lingkungan antariksa. Baik untuk tujuan penelitian, apalagi untuk kepentingan tujuan militer dalam kerangka pertahanan dan keamanan. Maka dalam Stockholm Declaration on the Human Environment. 1972.UN Doc. A/CONF.48/14/ Rev.1. 1072. negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa aktifitas yang dilakukan didalam yurisdiksi mereka atau dibawah kendali mereka tidak menyebabkan kerusakan bagi lingkungan negara lain atau dikenal dengan wilayah diluar batas yurisdiksi nasional "*areas beyond the limits of national jurisdiction*". Adapun tanggung jawab untuk menjamin bahwa aktifitas didalam yurisdiksi mereka atau dibawah kontrol mereka tidak menyebabkan kerusakan di luar batas wilayah yurisdiksi nasional telah ditetapkan dalam hukum internasional oleh Rio Declaration on Environment and Development, Principle 2. U.N. Doc. A/CONF.151/26.

Aspek Strategis Antariksa

Melihat antariksa sebagai sebuah aspek strategis dapat dipahami secara sederhana dalam dua kata, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan mahal dan berbahaya. Kemudian menurut Martin E.B. France and Jerry Jon Sellers (t.t.) di abad 21 atau era modern saat ini, bagi masyarakat internasional, antariksa kemudian dilihat dalam lima manfaat penting, yaitu 1) menempatkan pemahaman dalam perspektif Global, 2) melihat dengan pandangan yang jelas dari antariksa, 3) lingkungan dunia yang begitu luas, 4) sumber daya yang melimpah, 5) merupakan tantangan yang unik karena antariksa menjadi batas akhir alam semesta.

Manfaat strategis antariksa tersebut secara pararel selain menunjukkan kemampuan memanfaatkan antariksa oleh suatu negara juga secara langsung berperan dalam mendefinisikan kekuatan antariksa nasional negara tersebut. Sebagai konsekuensi dari hal itu adalah tingkat dari kemampuan di bidang antariksa yang tidak sama atau bahkan jauh berbeda antara satu negara dengan negara yang lain atau *level playing field* yang tidak sama. Sehingga tiap negara pada saat harus saling

berhadapan akan menunjukkan profil kekuatan yang berbeda pula. Globalisasi yang menjadi perspektif utama dalam era abad 21 merupakan hasil dari kegiatan antariksa yang menjadi faktor utama didalam menyebarkan aspek komersialisasi, kemudian sistem-sistem yang dapat dimanfaatkan pada aspek yang lain seperti sipil, militer atau penelitian ilmiah.

Sedangkan manfaat strategis yang paling menonjol adalah dalam penggunaan untuk tujuan kepentingan militer. Bahkan banyak negara-negara berupaya untuk mencari teknologi antariksa untuk mendukung kepentingan militer. Banyak negara mendasarkan kepada tiga alasan sebagaimana disampaikan oleh James A. Lewis (2007) menjadi prinsip penting didalam kepentingan mendayagunakan antariksa sebagai pendukung utama keamanan nasional, ke tiga alasan prinsip tersebut, yaitu 1) untuk kepentingan mencapai prestise politik dan memperluas pengaruh internasional sebagai konsekuensi dari kepemilikan teknologi antariksa, 2) dengan memiliki program antariksa maka semakin memperkuat kemampuan dan kepemilikan teknologi, dan 3) dengan kepemilikan aset antariksa maka diperoleh manfaat jasa dan informasi yang dapat digunakan untuk perencanaan strategis keamanan, operasi militer dan keamanan.

Penggunaan satelit dan jasa antariksa untuk keamanan nasional memberikan beberapa manfaat penting, diantaranya 1) jasa antariksa dapat memberikan keuntungan yang mampu melipatgandakan kekuatan dari pasukan konvensional, yaitu dengan meningkatkan kinerja dan kemampuan tempur mereka dan 2) jasa antariksa dapat secara signifikan memperluas data dan analisa intelijen untuk mengukur ancaman dan memberikan peringatan dini.

Tentunya banyak negara yang melakukan operasi militer, mengumpulkan data intelijen, dan merencanakan keamanan dan menjalankan fungsi strategis tanpa menggunakan akses jasa dan aset antariksa, tetapi hal ini tetap akan lebih menguntungkan pihak-pihak yang memanfaatkan antariksa dengan mengambil banyak keuntungan yang signifikan dibandingkan pihak lain yang menjadi musuh mereka. Dengan demikian dipahami bahwa manfaat strategis antariksa adalah menjadi wilayah yang bermanfaat untuk kepentingan damai, tetapi selain itu yang lebih penting lagi adalah bahwa program antariksa telah menjadi bagian yang menjadi prioritas utama sebagai tulang punggung dari unsur kekuatan nasional atau *national power*. Kekuatan nasional sebuah negara akan semakin meningkat di mata internasional, dimana prestise dan pengaruh internasional dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki akan semakin meningkat. Sehingga pada gilirannya akan mendorong kepemimpinan di dunia internasional.

Analisis

Dalam pergaulan internasional yang didasari atas kesepahaman berpikir menjadi sentral dari tujuan yang ingin dicapai oleh setiap negara. Berdasarkan pernyataan itu dapat kemudian disinkronkan dengan pendekatan konstruktivisme. Dimana didalam konstruktivisme menekankan kepada adanya *shared ideas* yang diyakini bersama. Sehingga dengan keyakinan bersama maka struktur-struktur dalam dunia internasional yang merepresentasikan kepentingan manusia dapat dipersatukan. Dalam tulisan Bob Sugeng Hadiwinata (2007) disampaikan bahwa ada sekurang-kurangnya dua pemikiran dalam teori konstruktivis yang relevan bagi studi Hubungan Internasional, yaitu 1) keyakinan bahwa struktur-struktur yang mempersatukan umat manusia lebih ditentukan oleh *shared ideas* daripada kekuatan material, 2) keyakinan bahwa identitas dan kepentingan aktor-aktor tertentu dibentuk oleh *shared ideas*, dan bukannya dibentuk oleh peristiwa alam semata. Berpijak dari dua keyakinan tersebut dapat dikerucutkan bahwa kondisi dunia internasional yang diwarnai oleh kemajuan teknologi antariksa yang demikian luar biasa itu akan mendorong sebuah konsekuensi logis terjadinya eksploitasi kawasan antariksa yang kemudian berdampak kepada kawasan dibawahnya (udara, laut dan daratan). Karena dengan kemampuan yang dimiliki oleh teknologi antariksa kondisi bumi akan dapat di eksplorasi demi kepentingan damai. Tetapi hal ini juga sangat terbuka pemanfaatannya untuk tujuan kepentingan politik, pertahanan dan keamanan suatu negara. Dalam perkembangan selanjutnya lebih banyak digunakan untuk kepentingan politik, pertahanan dan keamanan, serta ambisi sebuah negara yang ingin menguatkan posisi kepemimpinannya di dunia internasional. Kemudian pemikiran dan upaya-upaya dari para pemikir strategis mulai diarahkan untuk memperkuat kemampuan pertahanan dan keamanan khususnya militer dengan memiliki dan meningkatkan kemampuan teknologi antariksa. Gagasan untuk memperkuat pertahanan dan keamanan negara dengan teknologi antariksa menjadi pilihan prioritas bagi negara-negara besar dibidang keantariksaan misalnya seperti, Amerika Serikat, Rusia, China, India, Jepang, Korea Selatan, dan Utara. Hal ini mendorong para aktor negara berlomba-lomba meningkatkan kegiatan antariksanya dengan dalih kepentingan damai.

Kondisi tersebut tentunya pada titik tertentu akan menjadi bahaya laten bagi keamanan kawasan antariksa sehingga terbuka kemungkinan ancaman bagi kehidupan manusia di dunia. Kemudian muncullah gagasan untuk mengendalikan perilaku negara di bidang keantariksaan, tentunya hal ini diberlakukan kepada negara-negara besar pemilik dan pemanfaat teknologi antariksa untuk lebih bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan terkait kegiatan antariksanya. Gagasan-gagasan

yang diyakini ini selanjutnya menjadi gagasan yang menjadi keyakinan bersama, dimana struktur internasional dan kepentingan aktor negara secara bersama-sama bermuara menuju kepada kepentingan perlindungan kehidupan seluruh umat manusia sebagai suatu tujuan utama.

Dorongan dari gagasan yang diyakini bersama itu dapat mengarahkan kepentingan aktor negara untuk tidak saja memikirkan keamanan dan keselamatan negara mereka masing-masing tetapi bergeser kepada pemikiran bahwa keamanan dan keselamatan suatu negara tidak akan dapat berdiri sendiri tanpa memperhitungkan kondisi kawasan. Langkah penting berikutnya adalah menuangkan gagasan-gagasan tersebut kedalam suatu wujud nyata yang menjadi kesepakatan bersama. Wujud nyata yang dikehendaki tentunya tidak bergeser dari keyakinan bahwa wadah itu dapat mengendalikan perilaku negara-negara yang memiliki dan menggunakan kemampuannya dibidang antariksa untuk lebih bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan agar tidak menimbulkan dampak yang serius kepada negara lain dan kawasan disekelilingnya.

Munculnya faktor *shared idea* dalam perspektif konstruktivis dapat membantu menjelaskan bagaimana dalam kondisi perkembangan dunia internasional saat ini yang diwarnai dengan perilaku negara-negara pemilik dan pengguna keantariksaan, dimana pada titik tertentu muncul pula kecenderungan mereka untuk berkompetisi meningkatkan kemampuannya dalam menggunakan antariksa sebagai alat penguat jati diri kepemimpinannya di internasional. Jika sedikit kembali pada era perang dingin dimana *shared idea* ini dituangkan kedalam bentuk nyata yaitu CBM, maka di era antariksa saat ini tidak cukup hanya dengan ukuran-ukuran saling percaya saja. Hal ini mengingat bahwa perkembangan teknologi antariksa yang semakin signifikan didalam perencanaan strategis maka diperlukan upaya lebih tajam untuk membentuk sebuah wadah yang dapat menjadi pegangan setiap pihak bahwa apa yang sedang direncanakan oleh suatu negara itu tidak menjadi ancaman bagi pihak yang lain. Dalam konteks ini hal yang krusial diperlukan adalah suatu keterbukaan atau transparansi didalam perencanaan strategis, dimana setiap kebijakan dan perencanaan didasarkan kepada hasil dari aktifitas keantariksaan sehingga didapat rasa saling percaya diri dari pihak lain.

Kondisi saling percaya dengan dasar keterbukaan ini merupakan kondisi perubahan sosial-politik internasional yang didalam tulisan Bob Sugeng Hadiwinata (2007) dihasilkan dari sebuah asumsi konstruktivis bahwa politik internasional merupakan hasil dari suatu konstruksi sosial, yakni proses dialektika antara struktur dan agen dimana lingkungan sosial-politik dan manusia saling berinteraksi. Agen disini adalah negara dan

struktur adalah bentuk tatanan internasional sebagai suatu kesepakatan internasional. Pada konteks struktur dan agen ini posisi kepentingan negara didalam berinteraksi dengan struktur internasional yang merupakan lingkungan sosial politik internasional akan dapat melahirkan perubahan sosial politik internasional. Kondisi sosial politik internasional di era keantariksaan saat ini mendorong kepentingan dari negara untuk melihat bahwa keselamatan kawasan antariksa sebagai akibat dari kegiatan antariksa harus menjadi perhatian utama, apabila keamanan dan keselamatan manusia ingin terjamin kelangsungannya. Sebagai sebuah kawasan untuk kepentingan bersama, maka antariksa juga harus dikelola dan dilindungi keberlangsungannya secara bersama-sama pula. Untuk itu menjadi kepentingan negara-negara besar juga untuk menggulirkan gagasan yang harus di yakini bersama terhadap kegiatan antariksa khususnya yang berdampak kepada keselamatan dan keamanan seluruh manusia. Wujud gagasan itu kemudian adalah upaya membangun saling percaya dengan mendasarkan diri kepada keterbukaan yang lebih luas terkait kebijakan dan perencanaan kegiatan antariksa. Bangunan itu kemudian diperkenalkan kepada dunia internasional dan dikenal dengan TCBM.

Oleh sebab itu keberadaan rancangan dan konstruksi bangunan TCBM ini merupakan dasar pembentukan sebuah kode etik perilaku setiap aktor didalam interaksi hubungan internasional. Adapun tujuan lain dari rancangan kode etik yang paling fundamental adalah untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan kegiatan antariksa secara keseluruhan, demi kepentingan seluruh umat manusia. Adanya kesepakatan kesepahaman tentang perlunya sebuah transparansi secara internasional mendorong dibentuknya sebuah kode etik internasional atau *International Code of Conduct*. Kode etik ini didalamnya meliputi “*best practice*” atau “*rules of the road*”, dimana dengan diarahkan kepada praktek-praktek yang harus dilakukan dan bagaimana aturan yang dianut maka akan dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dari perilaku Negara di antariksa. Selain itu kode etik ini pun pada gilirannya akan dapat membantu mengurangi resiko atas terjadinya kesalahpahaman, salah perhitungan, dan salah persepsi atas apa yang menjadi komitmen negara-negara untuk berbagi kebijakan di bidang antariksa, termasuk didalamnya mencakup strategi dan prosedur yang nantinya mampu meningkatkan stabilitas dan keamanan lingkungan antariksa.

Hidup berdampingan dengan damai atau *peaceful of coexistence* merupakan tujuan dari masyarakat dunia yang akan tercapai dengan baik jika ada keterbukaan. Oleh sebab itu konsekuensi logis yang perlu dilihat dari hal tersebut adalah bahwa dengan meningkatkan transparansi terhadap kegiatan operasi antariksa akan mengurangi bahaya dari terjadinya tabrakan dari sampah yang dihasilkan dari

kegiatan antariksa dalam kurun waktu tertentu. Mengingat semakin seriusnya bahaya yang akan ditimbulkan dari puing-puing benda antariksa buatan manusia yang berpotensi menimbulkan tabrakan dan dapat bersifat jangka panjang.

Ancaman terhadap kawasan antariksa dan antisipasinya dalam hubungan internasional dapat didekati melalui pendekatan pilihan strategis konstruktivis. Dimana dalam memahami kondisi ancaman dan antisipasinya, konstruktivis, sebagaimana dijelaskan oleh Jutta Weldes (1996) yang berpijak pada konsep kepentingan nasional atau *national interest*. Konstruksi sosial yang diciptakan sebagai obyek yang bermakna. Kemudian obyek tersebut secara intersubyektif dan budaya telah mapan sehingga sistem internasional dan posisi negara di didalamnya dapat lebih bisa dipahami. Lebih khusus lagi Jutta Weldes (1996) menjelaskan bahwa kepentingan nasional muncul dari representasi atau melalui deskripsi situasi dan definisi masalah di mana pejabat-pejabat negara memahami dunia di sekitar mereka.

Selanjutnya Jutta Weldes (1996) berpendapat bahwa sebelum melakukan sebuah diplomasi, maka pemangku kepentingan dalam hubungan luar negeri suatu negara perlu terlibat dalam proses menafsirkan situasi tertentu dari negara tujuan yang akan menjadi lawan diplomasinya, sehingga akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan untuk menanggapinya. Kepentingan nasional menjadi sebuah wacana bersama dimana kepentingan nasional tersebut lahir dari proses membangun representasi dari para pemangku kepentingan negara didalam memahami konteks internasional yang terjadi. Adapun konsep kepentingan nasional dari pandangan konstruktivis ini tentu saja berbeda dengan apa yang dipahami oleh kaum realis pada umumnya. Kepentingan nasional menurut realis dapat diartikan sebagai sesuatu yang dimiliki berdasarkan kondisi geopolitik, sedangkan menurut konstruktivis adalah kepentingan nasional itu dibangun sebagai objek tidak serta merta melekat kepada dunia geopolitik tetapi melainkan melalui cara pandang yang membangun konsep, wacana dan pikiran dari apa yang dilihat, dimiliki, dan dipahami.

Kegiatan antariksa yang meliputi wilayah atau kawasan dimana seluruh umat manusia memiliki persamaan hak dalam mengakses dan memanfaatkan antariksa, menjadi kawasan yang menjadi perhatian bersama seluruh bangsa dan negara di permukaan dunia. Untuk itu menjadi suatu keniscayaan yang sulit untuk terbantahkan diperlukannya sebuah bangunan pemikiran bersama dari suatu "*best practice*" atau "*rules of the road*" terhadap kegiatan antariksa. Hal ini mengingat dimana batas-batas dunia secara geopolitik tidak lagi dapat bernilai secara fungsional, dan lebih kepada pemanfaatan bersama dari ruang antariksa. Mutual Interest ini lah kemudian mendorong di bentuknya

sebuah kode etik kegiatan antariksa internasional. Kawasan antariksa sebagai objek dan manusia sebagai subyek menjadi dua hal penting bagi konstruktivis dalam memandang perlunya transparansi yang dicerminkan ke dalam sebuah kode etik yang menjamin rasa saling percaya satu pihak atas pihak yang lain. Membangun sebuah pola pikir atau konstruksi berpikir dari pemangku kepentingan di panggung internasional merupakan sentral dari konstruktivis dalam memandang sebuah kode etik transparansi kebijakan keantariksaan tingkat dunia. Dengan melihat kepada manfaat strategis dari lingkungan antariksa dan didorong keinginan untuk melestarikannya sebagai sebuah *heritage of all mankind*, maka terkonstruksilah sebuah pola pikir yang menghendaki pengaturan dan pembatasan yang pada gilirannya dapat mengendalikan perilaku aktor internasional di bidang antariksa.

Kesimpulan

Dalam kesimpulan tulisan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa dengan perkembangan teknologi antariksa yang semakin pesat, dan disertai keinginan dari para aktor di bidang keantariksaan khususnya negara yang sangat terobsesi untuk mengeksplorasi dunia dan alam semesta, maka kondisi ini dengan sendirinya membawa potensi timbulnya masalah politik, pertahanan dan keamanan internasional yang semakin signifikan. Tentunya hal ini seiring waktu dengan kondisi semakin jarangnnya sumber daya alam akan menuntut upaya yang lebih masif di bidang keantariksaan.

Konsekuensi logis dari hal ini adalah antariksa menjadi wilayah yang berpotensi konflik seandainya tidak di lakukan sebuah upaya bersama untuk melindungi kawasan antariksa. Sebagaimana diketahui bahwa akses terhadap kawasan antariksa akan dapat memberikan posisi penting bagi interaksi sebuah negara di dalam panggung internasional. Didalam pendekatan konstruktivis muncul asumsi bahwa politik internasional merupakan hasil dari proses dialektika antara struktur dan agen, struktur tersebut adalah penyusun tatanan internasional sedangkan agen merupakan kepentingan negara, dengan berinteraksinya struktur dan kepentingan negara maka akan dilahirkan sebuah perubahan sosial-politik. Maksud perubahan sosial-politik disini adalah kondisi sebelumnya, dengan belum terbangunnya wadah TCBMs maka perubahan itu didasarkan kepada perkembangan kegiatan antariksa yang melahirkan perubahan sosial-politik internasional dalam bentuk terwujudnya TCBMs yang disebabkan keyakinan negara bahwa kawasan antariksa dan dampaknya pada kehidupan didunia perlu dijaga kelestariannya, sehingga diperlukan keterbukaan didalam kebijakan dan perencanaan keantariksaan negara. Oleh sebab itu pendekatan konstruktivis dapat membawa pada pemahaman kita bahwa masyarakat

internasional menginginkan tindakan yang lebih bertanggung jawab dari para pemilik teknologi antariksa untuk dapat bersikap lebih transparan dalam setiap kebijakan antariksanya.

Proses didalam mengkonstruksi pemikiran masyarakat internasional dalam membentuk sebuah upaya yang lebih transparan inilah yang dituangkan dalam TCBM keantariksaan. Dimana dengan TCBM ini akan dapat lebih menggiring perilaku bertanggung jawab dari para pemilik dan pengguna teknologi antariksa.

Daftar Pustaka

Buku

- Hadiwinata, Bob Sugeng, 2007. *TRANSFORMASI dalam STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL, Aktor, Isu dan Metodologi: Transformasi Isu dan Aktor di dalam Studi Hubungan Internasional: Dari Realisme hingga Konstruktivisme*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Cheema, Pervez Iqba, 2001. "What CBMs have gained until now", *Kashmir: What Next?* Islamabad: Friedrich-Naumann-Stiftung.
- France, Martin E.B. dan Sellers, Jerry Jon, t.t. "Chapter 4: Real Constraints on Spacepower", dalam *Toward a Theory of Spacepower: Selected Essays*. Institute for National Strategic Studies National Defense University.

Artikel Jurnal

- Clancy, Erin A, 1998. "The Tragedy of the Global Commons" 5 *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 5(2): 601-619.
- Javaid, Umbreen, 2010. "Confidence Building Measures in Nuclear South Asia: Limitations and Prospects", *South Asian Studies: A Research Journal of South Asian Studies*, 25(2): 341-359.
- Weldes, J, 1996. "Constructing National Interests", *European Journal of International Relations*, 2(3): 275-318.

Working Paper

- Chari, P.R., 2003. "Nuclear Crisis, Escalation Control and Deterrence in South Asia", *Stimson Centre Working Paper*, Version 1.0, Agustus.
- Desjardins, Marie-France, 1996. "Rethinking Confidence Measures", *Adelphi Paper*, Number 307, London: International Institute of Strategic Studies.

- Itty Abraham, 1993. "Pakistan-India and Argentina-Brazil: Stepping back from the nuclear threshold", *Occasional Paper*, No. 15, October.
- Jaspal, Zafar Nawaz, 2004. "Nuclear Risk Reduction Measures and Restraint in South Asia", *RCSS Policy Studies*, No. 25, Colombo: Regional Centre for Strategic Studies.
- Lewis, James A., 2007. "*Space and National Security*", *NEC Space and Defense Forum*, Tokyo: CSIS.

Artikel Online

- The Henry L. Stimson Center, tt. "What are Confidence Building Measures" [online]. dalam <http://www.stimson.org/cbm/cbmdef.htm>. [diakses pada Mei 2013].
- Theresa Hitchens, 2013. "Transparency and Confidence Building in Outer Space: Inching Toward Action", [online]. dalam <http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Articles/Special-Feature/Detail> [diakses pada 20 Juni 2013].
- United Nations, 1972. "Stockholm Declaration on the Human Environment. 1972. UN Doc. A/CONF.48/14/ Rev.1. 1972" [online]. dalam www.un-documents.net/aconf48-14r1.pdf [diakses pada Mei 2013].
- _____, 1992. "Rio Declaration on Environment and Development, Principle 2, U.N. Doc. A/CONF.151/26" [online]. dalam <http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm> [diakses pada Maret 2013].

